

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP *NO PERFORMING FINANCING***

(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019)

**Yugi Maheswari Esfi Setya Nanda<sup>1</sup>, Iwan Fakhruddin<sup>2\*</sup>, Azmi Fitriani<sup>3</sup>,  
Bima Cinintya Pratama<sup>4</sup>**

*Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
,[Iwanfakhruddin1975@gmail.com](mailto:Iwanfakhruddin1975@gmail.com)\**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan oleh dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah terhadap risiko pembayaran yang diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. Populasi penelitian adalah Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2015-2019. Sampel yang dikumpulkan adalah 14 bank syariah sebanyak 70 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negative terhadap NPF. Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap NPF.

**Kata Kunci: GCG, Risiko Pembiayaan, Perbankan Syariah**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) which is proxied by the board of directors, the board of independent commissioners, managerial ownership, institutional ownership, and the sharia supervisory board against payment risk as measured by the Non Performing Financing (NPF) ratio at the Bank Sharia General. The study population was a Sharia Commercial Bank Registered at Financial services Authority. The data used was secondary data in the form of reports annual Sharia Commercial Bank for the period 2015-2019. The samples collected were 14 Islamic banks as much as 70 data. The results showed that the board of directors has a negative effect on NPF. Independent board of commissioners, managerial ownership, institutional ownership, and sharia supervisory board have no effect on NPF.*

**Keywords: GCG, Financing Risk, Islamic Banking**

**PENDAHULUAN**

Kesehatan suatu bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara sesuai peraturan yang berlaku (Fitriana, dkk, 2015). Penilaian kesehatan bank sangat penting karena menyangkut reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan tersebut. Peringkat yang menjelaskan kategori perbankan dengan berbagai metode

yang dipergunakan akan sangat membantu untuk melihat posisi bank tersebut masuk dalam kategori sehat atau tidak sehat dan sebagainya (Fahmi, 2015).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah, 2012).

Dalam pengelolaan kredit juga diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka *non performing financing* dapat ditekan serendah mungkin, mengingat berbagai unsur-unsur *corporate governance* terlibat secara langsung dalam menentukan arah apakah suatu kredit akan bermasalah atau tidak. Hal ini dikarenakan *corporate governance* merupakan tata kelola yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow, 2003). Penerapan GCG pada perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, sehingga tingkat *non performing financing* bank syariah juga akan semakin menurun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yudhistira Ardana (2019) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan jumlah variabel yang digunakan. Pada penelitian Yudhistira Ardana (2019) menggunakan 4 periode yaitu 2008, 2011, 2014 dan 2017 dan menggunakan 5 variabel yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan risiko pembiayaan. Dengan begitu penelitian ini menambah variabel Dewan direksi karena Dewan Direksi merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Perbedaan selanjutnya terletak pada tahun penelitian penelitian ini menggunakan laporan tahunan periode 2015-2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

*Agency Theory* dikenal sebagai teori yang membahas konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi membahas hubungan antara manajer dan pemegang saham yang dilihat sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak dimana pemegang saham adalah prinsipal dan manajer sebagai agen.

### ***Good Corporate Governance***

Menurut Tangkilisan (2003: 11) *good corporate governance* (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Hal senada diungkapkan pula oleh Sutedi (2011:

58) GCG secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham (*stakeholders*). GCG hanya dapat tercipta apabila adanya keseimbangan antara kepentingan semua pihak dengan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007: 73).

### **Dewan Direksi**

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dewan direksi yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjadikan landasan dalam bekerja. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya dewan direksi diharapkan supaya pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi munculnya risiko, seperti yang dinyatakan oleh Claessens dan Fan (2002) yang menemukan bahwa ada hubungan antara penerapan GCG dengan pengurangan risiko keuangan.

### **Dewan Komisaris Independen**

Dalam pasal 114 ayat (1) Pasal 108 UUPT, dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat mengurangi munculnya risiko pembiayaan.

### **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

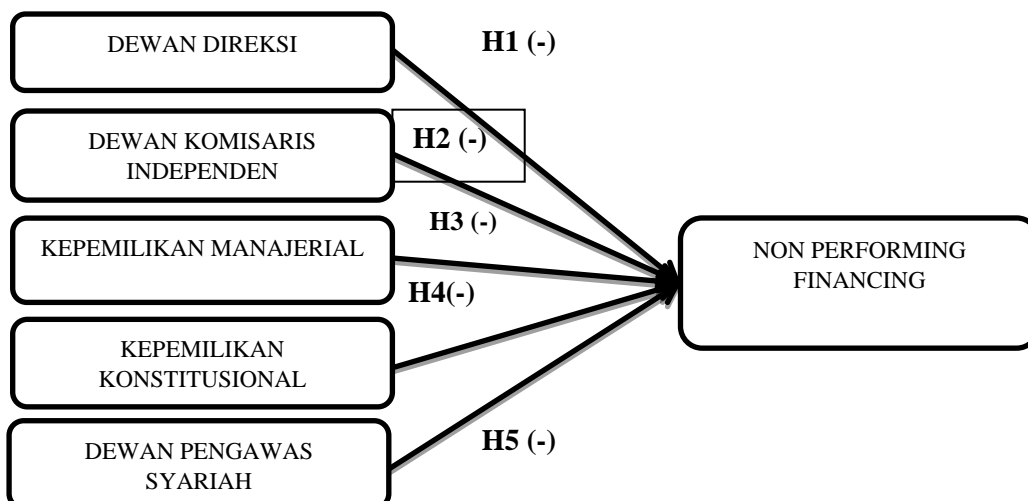
### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177). Kepemilikan Institusional diukur melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Dwi Sukirni: 2012).

### Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi munculnya risiko pembiayaan.

### KERANGKA PEMIKIRAN



### HIPOTESIS PENELITIAN

#### Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing*

Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya dewan direksi diharapkan supaya pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi munculnya risiko.

**H<sub>1</sub> : Dewan Direksi berpengaruh negative terhadap *non performing financing***

#### Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap *Non Performing Financing*

Pathan (2007) menyatakan bahwa peran dewan komisaris independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kaidah-kaidah corporate governance. Dewan komisaris independen juga memiliki peran sebagai penengah jika terjadi perselisihan di antara manajemen serta memberikan masukan-masukan demi kinerja lebih baik. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mewujudkan good corporate governance yang berimbas pada kegiatan operasional yang baik termasuk dalam keputusan pemberian kredit yang tepat sehingga dapat mengurangi tingkat NPL.

**H<sub>2</sub> : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*.**

**Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Non Performing Financing***

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan dimana dapat mengurangi tindakan tidak rasional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut teori Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan orang dalam dapat menyebabkan konvergensi kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Sehingga semakin banyak proporsi kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan meningkatkan motivasi dan kinerja dari para karyawan (Tertius dan Christiawan 2014). Kinerja tersebut termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana stakeholder menangani permasalahan dalam risiko yang ada di bank. Risiko yang dimaksud diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham terutama manajerial akan mengurangi agency cost dan mengurangi risiko kredit.

**H<sub>3</sub> : *Kepemilikan Manajerial* berpengaruh negative terhadap *Non Prforming Financing***

**Pengaruh Kepemilikan Institusioanal terhadap *Non Performing Financing***

Kepemilikan institusional dapat didefinisikan merupakan bagian dari mekanisme corporate governance pada perusahaan. Kepemilikan institusional juga merupakan pencegahan manipulasi konflik keagenan maka perlunya meminimalisir risiko kredit pada perbankan. Menurut Annisa dan Wardhani (2013) dalam Rismawati dan Utami (2018) suatu kepemilikan yang memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena adanya pemegang saham yang besar yang dapat mengawasi institusional yang lebih ketat. Sehingga apabila kepemilikan institusional telah berjalan dengan baik maka risiko kredit perbankan akan menurun atau juga tidak terjadi masalah-masalah keagenan yang menimbulkan konflik.

**H<sub>4</sub>: *Kepemilikan Institusional* berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing***

**Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Non Performing Financing***

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan semakin banyak jumlah DPS maka pengawasan terhadap risiko pembiayaan atau risiko kredit akan meningkat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekaputri (2014) tatakelola mampu menurunkan risiko pembiayaan bank umum syariah.

**H<sub>5</sub> = Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing***

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan penggunaan angka-angka pada pengujian teori-teori melalui variabel penelitian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019 dengan *purposive sampling*.

#### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **Ukuran Dewan Direksi (X1)**

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Iqbal, 2012)

$$\text{Dewan Direksi} = \Sigma \text{Anggota Dewan Direksi}$$

##### **Ukuran Dewan Komisaris Independen (X2)**

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham, pengendali direksi (cahyono, 2002:105)

$$KI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$$

Keterangan :

KI = Komisaris Independen

##### **Kepemilikan Manajerial (X3)**

Kepemilikan Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Riduwan dan Sari (2013), pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan:

$$MAN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total Keseluruhan Saham}} \times 100$$

Keterangan :

MAN = Kepemilikan Manajerial

**Kepemilikan Institusional (X4)**

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Menurut Riduwan dan Sari (2013), pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan :

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total Keseluruhan Saham}} \times 100$$

Keterangan :

INST = Kepemilikan Institusional

**Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X5)**

Antonio (2001) Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalanya operasional bank sehari-hari agar selalu dalam ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi yang terjadi dalam bank syariah sangat khusus, pengukuran dewan pengawas syariah dirumuskan :

$$DPS = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

**Non Performing Financing**

NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih , semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Muhammad,2015) dalam kiswanto (2016), pengukuran dewan pengawas syariah dirumuskan :

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan :

NPF = *Non Performing Financing*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi data dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Pengawas Syariah dan *Non Performing Financing* .

**Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
? Dewan Direksi (orang)	44	3	7	4.68	.959
Dewan Komisaris Independen (%)	44	.3333333333	1.000000000	.6056818181	.1483302056
kepemilikan manajerial (%)	44	.000000	1.180000	.05713530	.247959443
Kepemilikan Instisusi (%)	44	75.37000000	100.0000000	94.45951931	9.240832629
		0000000	00000000	8181820	904558

? DPS (orang)	44	2	5	2.39	.618
NPF (%)	44	0E-15	.2000000000 00000	.0590521389 85795	.0564750214 27639
Valid N (listwise)	44				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Pengawas Syariah dan *Non Performing Financing* memiliki nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat dikatakan baik.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		44
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.1131782
	Std. Deviation	.64772633
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.074
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas untuk data penelitian dapat dilihat pada tabel 2 dengan hasil pengujian data penelitian dalam hasil pengujian normalitas tersebut data belum terdistribusi normal sehingga di *casewise* agar data dapat terdistribusi normal, sehingga dapat dilihat hasil pengujian normalitas selanjutnya pada tabel 2.

Hasil tersebut sudah memenuhi ketentuan yang artinya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari  $<0,05$  menunjukkan bahwa data terdistribusikan normal. Sehingga data tersebut dapat dilakukan pengujian asumsi klasik selanjutnya.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.334	.132		2.522	.016		
	∑ Dewan Direksi (orang)	-.041	.009	-.701	-4.538	.000	.661	1.512
	Dewan Komisaris Independen (%)	-.104	.053	-.274	-1.984	.054	.827	1.209
	kepemilikan manajerial (%)	-.045	.033	-.198	-1.356	.183	.738	1.356



Kepemilikan Instisusi (%)	-.001	.001	-.110	-.667	.509	.582	1.717
$\sum$ DPS (orang)	.020	.014	.218	1.436	.159	.683	1.464

a. Dependent Variable: NPF (%)

Berdasarkan dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara masing-masing variabel bebas dengan variabel dependen, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena nilai *centered* VIF < 10.

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-103.025	45.402		-2.269	.049
	Lnx1	4.832	3.633	.701	1.330	.216
	Lnx2	1.214	2.399	.168	.506	.625
	Lnx3	.156	.209	.279	.748	.473
	Lnx4	19.365	9.156	1.305	2.115	.064
	Lnx5	3.324	3.017	.455	1.102	.299

a. Dependent Variable: Lnu2

Berdasarkan dari tabel 4 diatas yang menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas > 5% (0,05), yang berarti menunjukkan bahwa semua variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.633 <sup>a</sup>	.400	.321		.046523834509758	1.947

a. Predictors: (Constant),  $\sum$  DPS (orang), kepemilikan manajerial (%),  $\sum$  Dewan Direksi (orang), Dewan Komisaris Independen (%), Kepemilikan Instisusi (%)

b. Dependent Variable: NPF (%)

Berdasarkan hasil dari pengujian yang dapat dilihat pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai Durbin-Watson dalam angka diantara -2 sampai +2 yang berarti menandakan bahwa semua variabel terbebas dari gejala Autokorelasi.

### Uji Analisis Data

**Tabel 6 Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.055	5	.011	5.072	.001 <sup>b</sup>
	Residual	.082	38	.002		
	Total	.137	43			

a. Dependent Variable: NPF (%)

b. Predictors: (Constant),  $\Sigma$  DPS (orang), kepemilikan manajerial (%),  $\Sigma$  Dewan Direksi (orang), Dewan Komisaris Independen (%), Kepemilikan Instisusi (%)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan nilai F hitung 5,072 lebih besar dari F tabel 3,47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat dinyatakan *fit*.

**Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.633 <sup>a</sup>	.400	.321		.046523834509758

a. Predictors: (Constant),  $\Sigma$  DPS (orang), kepemilikan manajerial (%),  $\Sigma$  Dewan Direksi (orang), Dewan Komisaris Independen (%), Kepemilikan Instisusi (%)

Hasil analisis pada tabel 4.9 menunjukkan koefisien korelasi *Adjusted R Square* ( $Adj R^2$ ) 0,321 atau 32,1%. Artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel sebesar 32,1%. sedangkan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Seperti Capital Adequaty Ratio (CAR) memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Sri Wahyuni,2014).

**Tabel 8 Hasil Uji Regresi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.633 <sup>a</sup>	.400	.321		.046523834509758

a. Predictors: (Constant),  $\Sigma$  DPS (orang), kepemilikan manajerial (%),  $\Sigma$  Dewan Direksi (orang), Dewan Komisaris Independen (%), Kepemilikan Instisusi (%)

*Std. Error of the Estimate* merupakan penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent yang riil, yaitu sebesar 0,0465 satuan variabel dependent. Semakin kecil nilai standard error, semakin baik persamaan regresi tersebut.

**Tabel 9 Hasil Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.334	.132		2.522	.016
	$\Sigma$ Dewan Direksi (orang)	-.041	.009	-.701	-4.538	.000
	Dewan Komisaris Independen (%)	-.104	.053	-.274	-1.984	.054
	kepemilikan manajerial (%)	-.045	.033	-.198	-1.356	.183
	Kepemilikan Instisusi (%)	-.001	.001	-.110	-.667	.509
	$\Sigma$ DPS (orang)	.020	.014	.218	1.436	.159

a. Dependent Variable: NPF (%)

Hasil ini diperkuat oleh hasil Uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) lebih kecil sehingga dapat menjelaskan bahwa dewan direksi memiliki arah negative dan signifikan (nyata) terhadap *non performing financing*. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan hipotesis 1 ( $H_1$ ) yang menyatakan dewan direksi berpengaruh negative terhadap *non performing financing*, hipotesis dapat diterima.

Berdasarkan pengolahan data SPSS menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  -1,984 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  -0,2269 ini berarti dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negative terhadap *non performing financing*, atau dengan kata lain semakin banyak dewan komisaris independen maka akan semakin menurun tingkat *non performing financing*. Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,056, artinya bahwa variabel ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian  $H_a$  diterima dan hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* hipotesis tidak diterima.

Berdasarkan pengolahan data SPSS menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  -1,356 lebih besar dari  $t_{tabel}$  -0,2269 ini berarti kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negative terhadap *non performing financing*. Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,183, artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian  $H_a$  diterima dan hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*, hipotesis tidak diterima.

Berdasarkan pengolahan data SPSS menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  -1,356 lebih besar dari  $t_{tabel}$  -0,2269 ini berarti kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negative terhadap *non performing financing*. Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,509, artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian  $H_a$  diterima dan hipotesis 4 ( $H_4$ ) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*, hipotesis tidak diterima.

Berdasarkan pengolahan data SPSS menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  1,436 lebih besar dari  $t_{tabel}$  -0,2269 ini berarti dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positive terhadap *non performing financing*. Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,159, artinya bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian  $H_a$  diterima dan hipotesis 5 ( $H_5$ ) yang menyatakan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* hipotesis tidak diterima.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji pengaruh *Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan Bank Syariah di Indonesia yang menggunakan variabel independen dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah serta *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel dependen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan direksi memiliki pengaruh negative terhadap risiko keuangan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.
3. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.
4. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.
5. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.

### **Keterbatasan**

1. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam penelitian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai dari Adjusted R Square sebesar 32,1% tergolong rendah yang berarti bahwa masih ada faktor lain yang memiliki kontribusi sebesar 67,9% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi *non performing financing*.
2. Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya 44 data.

### **Saran**

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai dari Adjusted R Square sebesar 32,1% tergolong rendah, artinya pengaruh masing – masing variabel independen belum terlalu tinggi. Sehingga, selanjutnya peneliti menambahkan variabel lain yang lebih banyak misalnya Capital Adequacy Ratio.
2. Berdasarkan data yang dapat digunakan hanya 44 data saja. Sehingga, selanjutnya peneliti menambah data dengan menambah jumlah tahun penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta. Gema Insan Press
- Bernandhi, R. dan A. Muid. 2014. Pengaruh Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 3, No. 1, pp. 1-14. ISSN (Online) : 2337-3086.
- Brigham, E. F. dan J. F. Houston. (2001). Manajemen Keuangan. Edisi Kedelapan. Jilid II. Penerbit Erlangga. Jakarta

- Cahyono, Jaka E. 2002. Investing in JSX now? No, Im Not That Fool. Jakarta: PT Gramedia
- Dwi Sukirni. (2012). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*. 1 (2).
- EFitriana dkk. 2015. Tingkat Kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 17 Nomor 2*.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro Fardiansyah, r. (2016). The Influence of Voluntary Disclosure, Asimetri Informasi, Stock Risk, Firm Size and Institutional
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 98.
- Irham Fahmi, Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hal. 11-1
- I Wayan Purwanta Suta, Putu Ayu, I Nyoman Sugiarta. 2016. Pengaruh kebijakan utang pada nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan manufaktur di BEI). *Jurnal Akuntansi*. Vol.12, No. 3. Politeknik Negeri Bali
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360,
- Khairandy, Ridwan., dan Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Khatimah, H. 2009, Maret. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008. *Jurnal Optimal*, 3(1): 5
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N., 2003. *Corporate Governance*. 3rd Edition, Blackwell Publishing.
- Mutamimah, M. & Chasanah, S.N.Z. 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009*
- Rahman dan Sifitrie. 2018. Peran Non Performing Financing (NPF) dalam hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal BISNIS Vol 6*. IAIN Kudus.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sulistyanto 2003, "Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan Di Indonesia?" *Jurnal Widya Warta*, No.2 Tahun XXVI.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balaiurang.

Yudistira Ardana 2019, Implementasi Good Corporate Governance dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia , jurnal ekonomi dan perbankan syariah vol 4, no 1